



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CONSTANTINUS CHRISNAN SOEGIHERPAJOKO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PONTIANAK
3. NHK : 114633

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 74 m2/50 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/57 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 274.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA CBR SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA GTR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 65.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 260.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	2.349.000.000
III. HUTANG	Rp.	250.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.099.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.